

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR  
(Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)**

**Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: dimaskjk@gmail.com

***Abstract:** Implementation of Society Empowerment Program Through Basic Skills Training. Poverty is one of fundamental problems in any developing countries. Indonesia as one of developing countries attempt to address the problems of poverty through empowerment programs. Basic skills training is one of empowerment programs which aims to improve people's skills as a preparation to work and increase public welfare. This research aims to describe and analyzing the implementation process of society empowerment programs through basic skills training in Tambaksari District of Surabaya and the factors that influence the process of this implementation program. This research used qualitative approach method. Basic skills training which was held in Tambaksari District by government basically has been able to help improving people's skills and increasing poor people's life. However, in the implementation, this program was not get appreciate enough from the beneficiaries. so that the realization from the achievement of this program got less optimal results.*

***Keywords:** policy implementation, empowerment program, basic skills training*

**Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Dasar.** Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terdapat pada setiap negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan salah satunya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Pelatihan keterampilan dasar adalah salah satu program berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses implementasi program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Tambaksari pada dasarnya dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan hidup masyarakat keluarga miskin. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para penerima manfaat sehingga realisasi dari capaian program tersebut kurang mendapatkan hasil yang optimal.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, program pemberdayaan, pelatihan keterampilan dasar

---

## **Pendahuluan**

Indonesia dewasa ini menjadi salah satu dari sekian banyak negara berkembang. Salah satu permasalahan yang terdapat pada setiap negara berkembang adalah kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan maka akan mempengaruhi tujuan dan cita-cita negara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan model penanggulangan kemiskinan yang melibatkan langsung masyarakat dalam prosesnya. Tujuan utama dengan dilakukannya pemberdayaan yaitu untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat

lebih mandiri dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui tindakan mereka sendiri dan untuk diri mereka sendiri.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu Kota yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Rancangan pemberdayaan masyarakat ini didesain sebagai pengembangan potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin dan kemampuan potensi yang dimiliki oleh para *stakeholders* seperti organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.

Salah satu program Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan adalah melalui pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin. Pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin di Kota Surabaya. Selain itu,, pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan tumbuhnya kelompok-kelompok usaha baru.

Dalam pelaksanaannya, Para peserta dalam program pelatihan keterampilan dasar akan diberi bekal pelatihan dan juga akan mendapatkan pendampingan sehingga para peserta pelatihan keterampilan dasar akan tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang kemudian akan mendapatkan pendampingan serta bantuan peralatan kerja dan fasilitasi pemasaran agar bisa memproduksi dan memasarkan produknya secara mandiri.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan dasar bagi masyarakat miskin salah satunya dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari. Kecamatan Tambaksari merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Surabaya. Selain itu, berdasarkan kategori keluarga miskin menurut Kecamatan di Kota Surabaya, di

Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya masih terdapat sekitar 9804 keluarga yang termasuk ke dalam kategori keluarga miskin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?; dan (2) apakah faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya?

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pemahaman ini, keputusan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan keputusan untuk mengerjakan atau memutuskan untuk tidak mengerjakan atau tidak mengurus isu-isu atau hal-hal terkait. Islamy (2002) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik di antaranya:

- a) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan tahap proses atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Model manajemen implementasi menurut Nugroho (2009) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika

kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui (1) Implementasi strategi, (2) pengorganisasian, (3) penggerakkan dan kepemimpinan, (4) pengendalian.

Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) dalam Nugroho (2010) mengemukakan pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga model yaitu model kebijakan *Top-down*, *bottom-up*, dan *hybrid model*. Salah satu model implementasi yang menggunakan pendekatan *top-down* adalah model implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2009) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dalam proses kebijakan publik adalah (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (3) Karakteristik dari agen pelaksana; (4) Kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan (5) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana. Variabel-variabel bebas dari model implementasi van meter dan van horn ini diperoleh dari pendekatannya yang mencoba menghubungkan antara isu kebijakan dengan kinerja kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Sementara Edward III (1980, 1) dalam Nugroho (2009, h.512) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention implementation*. Edward juga menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok dalam implementasi agar dapat berjalan secara efektif yaitu *communication, resource, disposition*, dan *bureaucratic structures*.

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial seiring dengan berkembangnya perdagangan di seluruh dunia dan dengan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat. Soekanto (2012, h.320) mengartikan bahwa kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jika dilihat dari segi penyebabnya, Baswir (1997) membagi kemiskinan menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Kemiskinan natural. Adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin
- b) Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan
- c) Kemiskinan Struktural. Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

### 4. Konsep Pemberdayaan

Hikmat (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan sarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis. Hogan (2000), dalam Rukminto (2008) mengidentifikasi proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu

siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu:

- a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan
- b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan
- c) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- d) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
- e) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya, pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak baik pemerintah, pihak non-pemerintah, maupun masyarakat yang terlibat itu sendiri untuk dapat menjamin tercapainya hasil yang akan dituju.

## 5. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis model implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Adapun variabel lain yang digunakan adalah variabel faktor sumber daya pendukung dari implementasi dari Edwards III. Konsep tersebut diartikan oleh penulis sebagai suatu proses di dalam upaya memberdayakan masyarakat dimana tingkat keberhasilan dari implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan di kecamatan tambaksari dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan Kirk dan Miler dalam Moleong (2010, h.4) yang berpendapat bahwa "Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan

berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya."

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian ini yaitu di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya dan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan maksud agar data-data terkumpul dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan informan.

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data *Interactive Model* seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman (1994), dalam Pawito (2007). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen yang diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar merupakan program pemberdayaan dengan bentuk pelatihan keterampilan dasar yang terbagi menjadi beberapa jenis pelatihan dasar yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya juga terdapat mekanisme operasional yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin.

### a. Jenis-Jenis Pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dikelompokkan menjadi 4

jenis utama pelatihan diantaranya Pelatihan Makanan, Pelatihan Handycraft, Pelatihan Aneka Usaha, dan Pelatihan Menjahit yang terbagi dalam 9 sub jenis pelatihan yang dilaksanakan tersebar di 8 kelurahan di Kecamatan Tambaksari. Jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan disesuaikan dengan minat dan keinginan para calon peserta pelatihan. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Jenis dan peserta Pelatihan**  
**Keterampilan Dasar di Kecamatan**  
**Tambaksari Tahun 2012**

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Kue kering	75
2	Kecap	75
3	Cake Selai	100
4	Salon	50
5	Produk Rumah Tangga	100
6	Jahit Kreatif	100
7	Sabun Aroma	100
8	Media Kain	25
9	Lilin Aroma	25
Jumlah		650

**b. Peranan Masing-Masing Pihak Terkait Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya**

Bapemas KB sebagai lembaga teknis pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar dengan peranan dari masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Bapemas KB)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana (Bapemas KB) adalah penanggung jawab, perencana, dan pengarah dari pelatihan keterampilan dasar selaku lembaga teknis pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya. Adapun tugas dan peranan dari Bapemas KB Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana teknis detail kegiatan pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin
  - b) Menyusun jadwal pelaksanaan per titik pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin
  - c) Melakukan koordinasi dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin di Kecamatan
  - d) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Surabaya secara berkala sesuai dengan kebutuhan
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya (Bapemas KB) dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar memiliki tim Petugas Lapangan keluarga Berencana (PLKB) yang bertindak sebagai koordinator tim teknis untuk melaksanakan kegiatan di tiap-tiap kecamatan di Kota Surabaya. PLKB merupakan petugas lapangan dari Bapemas KB yang mengelola pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar di tiap kecamatan. PLKB di Kecamatan Tambaksari memiliki peranan sebagai pengelola dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari. Adapun tugas dan peranan dari PLKB selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada masyarakat
  - b) Melakukan pendataan dan verifikasi para calon peserta pelatihan
  - c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pelatihan
  - d) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Bapemas KB tentang perkembangan peserta pasca pelatihan.
3. Tim Pelatih dan Tenaga Pendamping Pelatihan Keterampilan Dasar

Tim pelatih dan tenaga pendamping merupakan pihak pelaksana pelatihan keterampilan dasar. Tim pelatih dan tenaga pendamping berperan dalam memberikan pembelajaran dan materi pelatihan kepada para peserta pelatihan keterampilan dasar. Selain itu, tim ini juga akan memberikan

bimbingan dan pendampingan pasca pelatihan guna memantapkan materi yang telah didapat dan mengembangkan kemampuan para peserta pelatihan. Tim pelatih dan tenaga pendamping pelatihan keterampilan dasar ini terdiri dari tenaga ahli pelatihan, fasilitator kelurahan dari PNPM Mandiri, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Adapun tugas dan peranan dari tim pelatih dan tenaga pendamping pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pelatihan keterampilan dasar bagi peserta pelatihan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya
- b) Memberikan pendampingan di bidang teknis peserta pelatihan pasca pelatihan dengan memberikan pemantapan produksi
- c) Memberikan pendampingan di bidang kelembagaan peserta pelatihan pasca pelatihan dengan membentuk kelompok usaha bersama
- d) Membantu memasarkan hasil produksi peserta pelatihan
- e) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tentang perkembangan peserta pasca pelatihan.

#### 4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan suatu kelompok usaha yang tergabung dari para peserta hasil pelatihan keterampilan dasar yang telah dilaksanakan oleh Bapemas KB. KSM berperan sebagai suatu organisasi usaha yang di dalamnya terdapat susunan kepengurusan terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok hasil pelatihan keterampilan dasar yang telah dilaksanakan. Di Kecamatan Tambaksari terdapat KSM sebanyak 67 KSM hasil dari pelatihan keterampilan dasar di 8 Kelurahan yang dilaksanakan oleh Bapemas KB Kota Surabaya.

### c. Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Berdasarkan buku pedoman umum pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, dalam perencanaan pelaksanaan program pelatihan keterampilan dasar ini dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan Pelatihan, Tahap Pasca Pelatihan.

#### 1. Tahap persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari adalah dengan membentuk kelompok yang terbagi masing-masing kelompok dengan jumlah 20-25 orang. Kelompok tersebut yang kemudian akan ditentukan jenis-jenis pelatihan berdasarkan diskusi kelompok dengan para petugas lapangan pelaksana kegiatan pelatihan keterampilan dasar.

Selanjutnya, untuk sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi tim yang akan melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan tim petugas lapangan yang akan memberikan pelatihan untuk diberikan arahan dan teknis pelaksanaan di kecamatan tambaksari.

Untuk proses tahapan persiapan yang dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari untuk tim pelaksanaan sendiri adalah koordinasi persiapan tim pelaksanaan tentang teknis pelaksanaan kegiatan beserta tugas masing-masing yang di dalamnya termasuk persiapan materi yang akan diberikan dari tenaga ahli pelatihan, penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian melakukan sosialisasi dan seleksi calon peserta pelatihan yang dilakukan oleh PLKB. Sedangkan untuk para calon peserta pelatihan sendiri adalah dengan pembentukan kelompok yang terbagi dalam kelas-kelas pelatihan dan pemilihan pelatihan yang diinginkan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Dalam tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pelaksanaan pelatihan. Dalam kegiatan pelatihan, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian materi pelatihan dasar kepada peserta latih selama 2 sampai 4 hari sesuai dengan jadwal dan jenis

pelatihan yang telah ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah pendataan peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan juga dilakukan pendataan melalui absensi kedatangan peserta latih. Sedangkan tahapan pelaksanaan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan juga dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.

Proses Tahapan Pelaksanaan yang dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari dilaksanakan di Balai RW. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama 2-4 hari sesuai dengan jenis pelatihan masing-masing. Satu kelompok pelatihan melaksanakan satu jenis pelatihan dengan didampingi oleh dua orang tenaga ahli pelatihan. Selama pelatihan peserta diajarkan materi dasar tentang pelatihan yang telah ditentukan serta diberikan contoh praktek sesuai materi yang telah diberikan. Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan juga dilaksanakan monitoring dalam pelaksanaan pelatihan. Monitoring dilakukan dengan cara membuat berita acara dan absensi pendataan peserta pelatihan mulai dari daftar peserta pelatihan, materi yang diberikan, kehadiran pada saat pelatihan. Pelaksanaan monitoring ini dipantau oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Tambaksari. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan.

### 3. Tahapan Pasca Pelatihan

Tahapan pasca pelatihan merupakan tahap akhir dari kegiatan pelatihan keterampilan dasar. Tahapan pasca pelatihan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu pendampingan pasca pelatihan dan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Dalam tahapan pendampingan pasca pelatihan terdapat 3 proses yang diantaranya: (1) Pendampingan oleh pelatih dan asisten pelatih; (2) Pendampingan oleh fasilitator kelurahan (Faskel) dari PNPM Mandiri; (3) Pendampingan oleh kader pemberdayaan masyarakat (KPM)

Sedangkan untuk tahapan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan terdapat 2 proses yang dilaksanakan diantaranya

pertemuan yang dilakukan secara berkala antar pihak terkait dan monitoring dan evaluasi hasil pendampingan yang dilakukan oleh PLKB Kecamatan Tambaksari.

proses pendampingan di Kecamatan Tambaksari dilaksanakan selama 6 kali pendampingan. Pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah dengan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pemantapan teknis produksi yang dilakukan oleh para pelatih jenis pelatihan terkait. Selanjutnya para peserta pelatihan juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat tentang inovasi dari materi yang telah diajarkan dalam pelaksanaan pelatihan. Untuk pendampingan yang dilaksanakan oleh fasilitator kelurahan (Faskel) dari pihak PNPM Mandiri merupakan pendampingan dengan bentuk manajemen kelompok dan permodalan dimana kelompok-kelompok peserta pasca pelatihan yang tergabung dalam tiap-tiap jenis pelatihan dikelompokkan untuk dibentuk suatu kelompok usaha dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara bantuan modal diberikan melalui dana bantuan sosial yang diberikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam bentuk uang. Bantuan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dari para peserta yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut.

Untuk monitoring dan evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari dengan mengadakan koordinasi antara tenaga ahli pelatihan, fasilitator kelurahan, PNPM Mandiri dan PLKB Kecamatan Tambaksari. Koordinasi yang dilakukan dengan membahas sejauh mana perkembangan kelompok peserta pelatihan, kendala-kendala yang dialami oleh kelompok peserta pelatihan pasca pelatihan, serta bentuk-bentuk pendampingan yang telah diberikan kepada kelompok peserta latih.

**d. Sumber Daya Pendukung Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya**

Sumberdaya pendukung yang terdapat dalam implementasi pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari ini diantaranya sumberdaya manusia, anggaran, dan informasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelatihan keterampilan dasar yaitu Bapemas KB selaku penanggung jawab dan perencana; PLKB selaku koordinator pelaksana di lapangan, monitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; tenaga ahli pelatihan dari pihak swasta selaku tim yang memberikan materi pelatihan, memberikan pendampingan teknis pasca pelatihan, monitoring, dan evaluasi kemampuan kelompok; Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan fasilitator kelurahan (Faskel) dari PNPM Mandiri selaku tim yang memberikan pendampingan kelembagaan pasca pelatihan, pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok usaha yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah melaksanakan pelatihan keterampilan dasar, monitoring, dan evaluasi kemampuan serta bantuan bagi kelompok.

Sumber daya pendukung selanjutnya yaitu sumber daya anggaran. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya tentang penanggulangan kemiskinan. Selain dari APBD, dukungan anggaran yang diberikan dalam pelatihan keterampilan dasar ini juga berasal dari PNPM Mandiri berupa Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Bantuan lain juga diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui hibah pemerintah kota berupa peralatan usaha.

Sumber daya informasi yang dimiliki dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar ini diantaranya adalah

database dinamisasi keluarga miskin Kota Surabaya Tahun 2010 yang digunakan sebagai informasi dan pendataan, verifikasi dan validasi peserta pelatihan. Sedangkan untuk sumber daya informasi lainnya yaitu berupa buku pedoman umum pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin yang digunakan sebagai *Standart operating procedure* (SOP), landasan implementasi dari pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga miskin.

**e. Kinerja Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya**

Kinerja dari implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat diukur dari keberhasilan antara tujuan dan hasil yang diharapkan dengan capaian pelaksanaan program di Kecamatan Tambaksari. Berdasarkan buku pedoman umum pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin terdapat 4 hasil yang diharapkan dari adanya pelatihan keterampilan dasar yaitu penguasaan keterampilan dasar bagi perempuan keluarga miskin, tumbuhnya kelompok-kelompok usaha baru keluarga miskin, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga miskin, dan terbangunnya hubungan secara integral antar beberapa pihak khususnya PNPM Mandiri Perkotaan untuk secara bersama-sama melakukan intervensi sosial dan ekonomi kepada kelompok perempuan keluarga miskin pasca pelatihan.

Namun yang terjadi di di lapangan tidak semua dari 4 ukuran hasil yang diharapkan tercapai di Kecamatan Tambaksari. Dari ke 4 hasil yang diharapkan, terdapat satu hasil yang masih belum tercapai yaitu tumbuhnya kelompok-kelompok usaha baru keluarga miskin. Tumbuhnya kelompok-kelompok usaha baru keluarga miskin ini berkaitan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terbentuk dari para peserta pasca program pelatihan berdasarkan jenis pelatihan yang telah diikuti. Untuk KSM di

Kecamatan Tambaksari sendiri sampai dengan Tahun 2012 terdapat 67 KSM hasil pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan yang tersebar di 8 Kelurahan.

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua KSM di Kecamatan Tambaksari aktif. dari data yang diperoleh di lapangan Setidaknya terdapat 30 KSM atau separuh dari jumlah KSM di Kecamatan Tambaksari berstatus tidak aktif. Selain hal tersebut, dalam tiap KSM juga banyak anggota-anggotanya yang berkurang dari jumlah awal KSM terbentuk. Terdapat hanya sekitar 37 KSM yang berstatus aktif, sedangkan untuk jumlah anggota baik yang KSM aktif juga rata-rata kurang dari kuota KSM minimal yaitu 15 anggota. Sehingga hal ini menyebabkan capaian hasil dari sisi menumbuhkan kelompok-kelompok usaha baru bagi keluarga miskin tidak tercapai dengan baik.

### **Kesimpulan**

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari terdiri dari 4 jenis utama pelatihan yaitu pelatihan makanan, handycraft, menjahit, dan aneka usaha dengan 9 sub pelatihan yang dilaksanakan. Dalam mekanisme pelaksanaannya yang terdiri dari beberapa tahapan dari persiapan hingga evaluasi telah dilakukan secara baik dan dapat memberikan peningkatan keterampilan dan penghasilan dari beberapa kelompok keluarga miskin di Kecamatan Tambaksari. Namun peningkatan keterampilan dan penghasilan bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan ini masih belum mencakup seluruh tujuan target dan sasaran awal. Realisasi dari

capaian program yang dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari masih belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sementara untuk sumber daya pendukung dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya telah dimanfaatkan dengan baik.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya adalah adanya agen pelaksana pendukung dari berbagai pihak terkait serta adanya koordinasi antar pihak terkait yang baik yang dilakukan secara berkala dari atas ke bawah begitu juga sebaliknya. Untuk faktor penghambat yaitu Kurangnya kesadaran peserta pelatihan dalam mengikuti proses pelatihan keterampilan dilihat dari masih adanya peserta pelatihan yang tidak hadir dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dan juga kurangnya perhatian para peserta saat pelatihan berlangsung. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan dari para peserta pelatihan yang berbeda-beda dalam mengikuti program tersebut. Kemudian faktor berikutnya yaitu kondisi lingkungan di Kecamatan Tambaksari yang kurang mendukung adanya pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari pola pikir dari masyarakat kecamatan Tambaksari yang bersifat skeptis terhadap pemberdayaan dan hanya ingin menerima bantuan langsung dari pemerintah saja. Sehingga dalam hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menerima program tersebut kurang baik.

---

### **Daftar Pustaka**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008) **Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta, Rajawali Pers.
- Baswir, Revrison. (1997) **Agenda Ekonomi Kerakyatan**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hikmat, R. Harry. (2010) **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi**. Bandung, Humaniora Utama Press

- Islamy, M. Irfan. (2002) **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexi. (2010) **Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi**. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. (2009) **Public Policy Edisi Revisi**. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Pawito. (2007) **Penelitian Komunikasi Kualitatif**. Yogyakarta, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)
- Soekanto, Soerjono. (2010) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta, Rajawali Pers.